

KEBERHASILAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI BATUMARTA UNIT VII KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN TAHUN 1979-1990

Oleh: Chalim Habibi, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 12407144020@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Transmigrasi merupakan aspek penting dalam pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi bagi Indonesia. Transmigrasi di Baturanta unit VII memberi pengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat khususnya kepada para warga transmigran di Baturanta unit VII. Pada tahun 1979 melalui program IBRD pemerintah membuka UPT Baturanta unit VII, kemudian warga-warga yang telah terdaftar dari wilayah Jawa dan Bali mulai mengisi wilayah tersebut. Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui awal mula berdirinya Baturanta unit VII, perkembangan pemukiman transmigrasi Baturanta unit VII tahun 1979-1990, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa dari awal dibukanya UPT Baturanta unit VII pada tahun 1979 sampai pada tahun 1990, terjadi dinamika yang cukup panjang, termasuk perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Baturanta unit VII. Transmigrasi di Baturanta unit VII memiliki dampak, pertama, dampak sosial yaitu para warga transmigran lebih mempunyai rasa tolong-menolong yang tinggi terhadap sesama warga transmigran sebab mereka merasa memiliki kesamaan nasib. Kedua, dampak ekonomi, pemerintah memberikan tanah perkebunan seluas 5 hektar per kepala keluarga yang membuat kehidupan transmigran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, dampak budaya beragam suku yang ada di Baturanta unit VII menyebabkan terjadinya perpaduan budaya atau asimilasi. Selain itu pengelolaan dan pelatihan yang di berikan pemerintah kepada warga transmigran yang cukup baik membuat kesuksesan transmigrasi di Baturanta unit VII.

Kata Kunci: Transmigasi, Baturanta Unit VII, Sumatera selatan.

THE SUCCESSFUL TRANSMIGRATION PROGRAM IN BATUMARTA UNIT VII DISTRICT OGAN KOMERING ULU SOUTH SUMATERA YEAR 1979-1990

Abstract

Transmigration is an important aspect in the equity population and the equity of economy for Indonesia. Transmigration in Baturanta unit VII has influenced the development of people's lives especially for transmigrant residents in Baturanta unit VII. In the year 1979 through IBRD (*Internasional Bank For Reconstruction and Development*) program, the government opened TPU(Tranmigrant Placement Unit) in Baturanta unit VII, after that the people who was registered from Bali and Java has begin to fill in that area. The purpose of this study is to know the beginning of the establishment Baturanta unit VII, transmigration settlement development of Baturanta unit VII in 1979-1990, as well as its impact on surrounding communities. This study research was find fact that from the begining this TPU(Transmigrant placement Unit) in 1979 until 1990, there is long time developoment hapened. Including economic changes, social, and cultural who was hapened in Baturanta unit VII. Transmigration in Baturanta have impact's, *first*, social impact, this social impact is that people of Baturanta have more feeling to helping each other becouse they have the same fate as transmigrant. *Second*, economi impact, with the land area of five hectares who was given by government, that's make life more better then before for transmigrant in Baturanta Unit VII. *Third*, cultural impact, a lot of ethnic in Baturanta that's make people in Baturanta Unit VII was mixed cultural between one and onother culture and then that's make asimilation in there. Moreover, good managing and training was given by government to transmigrant people in Baturanta unit VII that's making this transmigration program reach their successful.

Key word: Trasmigation, Baturanta Unit VII, South Sumatera.

I. PENDAHULUAN

Transmigrasi mulai muncul sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, atas kemenangan golongan liberal di parlemen kerajaan Belanda pada Tahun 1900.¹ Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang. Transmigrasi di Indonesia pertama kali dilakukan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1905 yang masih dalam fase percobaan. Pada tahun 1905 transmigrasi dilakukan dengan memindahkan satu rombongan yang terdiri dari 155 kepala keluarga dari Karisedenan Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan (Lampung).² Pemerintah Belanda mengutus H.G Heitjing untuk melakukan fase percobaan transmigrasi sebagai wujud dari salah satu kebijakan politik etis yaitu migrasi.

Transmigrasi yang terjadi setiap tahunnya meluas hingga daerah Batumarta, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dimana banyak penduduk yang ditransmigrasikan di daerah tersebut. Pada tahun 1976 pemerintah mencanangkan program transmigrasi untuk menempati wilayah ini, rata-rata para transmigran berasal dari wilayah Jawa dan Bali. Sebelum dicanangkannya program transmigrasi, daerah ini masih merupakan hutan belantara. Penerapan program ini mengubah daerah ini menjadi penghasil karet, hal itu tentu terdapat kerjasama dari pemerintah dan warga transmigran. Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahun 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam Pembangunan Nasional. Masa selanjutnya, pada repelita ke-3 (1979-1990) ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan transmigrasi spontan lebih didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran.

Pada daerah batumarta unit VII mayoritas perpindahan penduduk dilakukan pada tahun 1979 dikarenakan beberapa faktor seperti adanya gas beracun di daerah Dieng, bencana tanah longsor di Temanggung, dan kekeringan di Bali sedangkan transmigran dari daerah lain

mereka mendaftarkan diri untuk ikut program transmigrasi yang canangkan oleh pemerintah pada masa itu. Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah di daerah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi karet yang menjadi program pemerintah waktu itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keberhasilan transmigrasi dapat dilihat dari tujuan transmigrasi itu sendiri. Di daerah Batumarta, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dapat dilihat tingkat keberhasilannya dari penghasilan getah karet yang diproduksi juga dengan melihat pendapatan perkapita. Jika pada masa itu pada daerah UPT belum makmur maka transmigrasi tidak bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Mengingat salah satu tujuan transmigrasi ialah untuk kemakmuran warga, hal ini juga akan membuktikan bahwa Batumarta menjadi penghasil getah karet terbesar di Sumatra Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan mengetahui bagaimana keberhasilan dari kebijakan pemerintah mengenai transmigrasi yang ditempatkan di daerah Batumarta, Sumatera Selatan khususnya di daerah pemukiman transmigrasi Unit VII.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).³ Heuristik merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapatkan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua cara yaitu dengan sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan dengan merekonstruksi

¹ Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2005), hlm. 8.

² Patrice Levang, *Ibid.*, hlm 10.

³Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 10.

peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Transmigrasi Pada Tahun 1979-1990

Kehadiran transmigrasi sudah lama terjadi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Transmigrasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *transmigratus* yang kemudian diambil dari bahasa Inggris menjadi *transmigration* yang berakar dari kata *migratie* yang memiliki makna berpindah tempat. Kemunculan kata *trans* dalam transmigrasi dilatarbelakangi oleh keadaan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang kemudian transmigrasi memiliki makna berpindah dari satu pulau ke pulau lain.⁴ Kelahiran transmigrasi di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang pada waktu itu disebut Kolonialisasi. Transmigrasi dilakukan pertama kali pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda. Perpindahan penduduk dari daerah Karisidenan Kedu ke daerah Gedong Tataan Lampung merupakan kesuksesan program transmigrasi yang pertama.⁵

Ketika baru merdeka dari penjajahan Jepang, di Indonesia masih terjadi gejolak politik, sehingga permasalahan kepadatan penduduk masih terabaikan. Baru tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950. Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementerian Sosial. Baru tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang

digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Departemen Transmigrasi dan Koperasi.⁶ Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas.⁷ Namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi di kemudian hari yaitu seperti tercantum pada Undang-undang No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, maka terjadi pemisahan. Pada zaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sehingga dikenal istilah transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi biaya sendiri, dan transmigrasi spontan. Dalam sistem transmigrasi umum segala keperluan transmigran, sejak pendaftaran sampai di lokasi menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama delapan bulan pertama, bibit tanaman, serta alat-alat pertanian. Transmigrasi keluarga merupakan merupakan sistem transmigrasi beruntun, artinya jika ada keluarga transmigran ingin mengajak keluarganya yang masih tinggal di pulau Jawa untuk tinggal di daerah transmigrasi, maka transmigran lama harus menanggung biaya hidup dan perumahan transmigran baru. Sistem ini tidak jalan, karena terlalu memberatkan peserta transmigrasi, sehingga tidak dilaksanakan lagi sejak 1959.

Pada zaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Tahun 1965-1969, belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian

⁴ Ramdhan KH, dkk., *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Departemen Transmigrasi RI, 1993), hlm. 3.

⁵ Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2005), hlm. 8.

⁶ Heeren, H. J. *Op.cit.*, hlm. 32.

⁷ Sri Edi Swasono, "*Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi*", dalam Sri Edi Swasono dan Masri Sinagrimbun, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1986*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.80.

terhadap program transmigrasi.⁸ Daerah transmigran seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua.

Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya undang-undang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui tujuannya itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar *the circular flow of income* dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan akibat strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi dan separatisme memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH.

Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran tidak merupakan *enclave* serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perhatian yang sama, dengan tujuan untuk meredakan potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada kerangka pembangunan daerah

yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah “mengisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional”.⁹

Misi di atas dilakukan melalui konsep pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat, antara lain dengan upaya peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, dan mewujudkan agropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dilakukan pendekatan kultural dengan memperhatikan sistem nilai dan perilaku serta adatistiadat masyarakat setempat, sehingga pembangunan transmigrasi tidak lagi bersifat eksklusif dalam kehidupan siklus, melainkan melalui berbagai teknik pembauran.

Konsep manajemen pembangunan transmigrasi yang dijalankan antara lain, pembangunan transmigrasi yang reformis tidak lagi menekankan pada target pemindahan transmigran, melainkan pada pencapaian pertumbuhan kesejahteraan transmigran yang dikaitkan dengan kemampuan daya beli dari transmigran yang paling miskin dengan ukuran keberhasilan minimal transmigran terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, menjadikan transmigrasi sebagai suatu kebutuhan yang diminta oleh masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Selanjutnya pada masa Orde Baru transmigrasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Transmigrasi Umum (TU), yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (umumnya pola tanaman pangan di lahan kering dan di lahan basah).
- b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yang sebagian dibiayai oleh pemerintah (umumnya untuk

⁸ Sri Edi Swasono, *op. cit.*, hlm. 77

⁹ Departemen Transmigrasi dan PPH, *op. cit.*, hlm 18-19.

- prasarana), dan sebagian lagi dibiayai oleh Pengusaha melalui Kredit Koprasi Para Anggota (KKPA).
- c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yang dibiayai sepenuhnya oleh transmigran, sedangkan pemerintah menyediakan lahan seluas dua hektar atau Kepala Keluarga.
 - d. Transmigrasi Pola Agro Estate (PIR-Trans Mandiri) yang merupakan bentuk perkebunan yang dikelola secara agribisnis.¹⁰

Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dapat dibedakan menjadi berikut ini.

- a. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilakukan melalui program pemerintah. Biaya transmigrasi ditanggung pemerintah, termasuk penyediaan lahan pertanian dan biaya hidup untuk beberapa bulan
- b. Transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas kesadaran dan biaya sendiri (swakarsa).
- c. Transmigrasi sektoral, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama antara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi.
- d. Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap satu desa atau daerah secara bersama-sama.

B. Kondisi Pemukiman Transmigrasi Batumarta Unit VII Tahun 1979-1990

Pemukiman unit VII merupakan salah satu pemukiman yang terletak di kawasan Transmigrasi Batumarta. Pada awalnya, kawasan tersebut terletak dalam wilayah Kecamatan Peninjauan, Baturaja Timur dan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan dengan luas areal pencadangan 82.000 ha. Wilayah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH TK I Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39/KPTS/1975 tanggal 30 Juli 1975 seluas 65.000 ha, dan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH TK I Sumatera Selatan Nomor 703/KPTS/1983 tanggal 10 Desember 1983

seluas 17.000 ha (Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten OKU, 1993).¹¹ Sedangkan untuk unit VII sendiri luasnya sekitar kurang lebih 800 ha.

Pembangunan permukiman transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Batumarta unit VII dilaksanakan melalui Proyek Transmigrasi Batumarta yang berkedudukan di Kabupaten OKU, merupakan proyek bantuan dari IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) 1 pada tahun 1976.¹² Untuk unit penempatan transmigran yang ada di unit VII sendiri terdapat sebanyak 386 kepala keluarga dengan jumlah transmigran sebanyak 1687 jiwa. dan luas total lahan yang diberikan kepada para transmigran melalui proyek IBRD I berbeda dengan proyek IBRD III yaitu 5 ha per KK.

Rincian alokasi peruntukan lahan dan luas masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Luasan lahan pertanian yang diberikan kepada transmigran di kawasan Batumarta unit VII

IBRD I	Luas (ha)
Lahan pekarangan	0,25
Lahan usaha I	0,75
Lahan usaha II	2,00
Kebun karet	1,00
Cadangan	1,00
Jumlah	5,00

Sumber: Kandep Transmigrasi Kabupaten OKU (1990)

Pemukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi Batumarta unit VII termasuk ke dalam kategori Transmigrasi Umum Lahan Kering (TULK) dengan pola kegiatan usaha pokok tanaman non pangan, sehingga perlakuan pembinaan pada umumnya sama dengan perlakuan yang diberikan bagi permukiman transmigrasi umum pola tanaman pangan lainnya. Hal yang membedakan perlakuan atau pola pembinaannya adalah pada alokasi lahan seluas 5 ha per KK berikut

¹¹ Heeren, H.J, *Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), hlm. 22.

¹² Hardjono, Joan, *Transmigrasi – Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 50.

¹⁰ *Ibid.*

bantuan pembangunan kebun karet seluas 1 ha bagi transmigran di UPT pada lokasi penelitian dibandingkan alokasi lahan yang hanya 2 ha per KK dan tanpa bantuan pembangunan kebun karet bagi lokasi-lokasi TULK lainnya. Pengalaman pahit getir para petani pada umumnya dalam mengusahakan usaha tani tanaman pangan di lokasi penelitian selama 5 tahun masa pembinaan di satu pihak, dan adanya indikasi keberhasilan pembangunan kebun karet seluas 1 ha dari bantuan proyek memberikan pembelajaran yang berharga dan rasa optimisme para petani untuk berpaling kepada pengusahaan tanaman karet dari pada mengusahakan tanaman pangan. Selanjutnya sejak tahun 1986 dimana kebun karet bantuan proyek pada lokasi transmigrasi Batumarta unit VII telah menghasilkan atau mulai disadap, perhatian petani mulai tertuju kepada pengembangan tanaman karet.¹³

Pengelolaan kebun karet transmigran di Batumarta unit VII menerapkan dua pola yaitu pola bebas atau non mini estate dan pola mini estate. Pola bebas adalah system pengelolaan karet yang dilaksanakan sendiri oleh transmigran pada kebun karetnya masing-masing. Pola mini estate adalah sistem pengelolaan karet yang kegiatan penyadapan, pemeliharaan, pengolahan hasil dan pemasarannya melalui KUD setempat dengan supervisi oleh PTP. Pembinaan kebun karet secara keseluruhan dibina oleh tim pola terpadu, sesuai dengan SK Bupati KDH Tk II OKU Nomor:525.21/120/V/1985 tanggal 12 Desember 1985 dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D II). Penerapan pola ini menunjukkan dampak yang positif untuk mempercepat perkembangan ekonomi transmigran (Kandeptrans Kabupaten OKU, 1993). Dengan berkembangnya perkebunan karet tersebut, warga transmigran secara bertahap telah membuka Lahan Usaha II dan Lahan cadangan untuk mengembangkan tanaman karet secara swadaya.¹⁴

Pola penyediaan lahan bagi transmigran ada dua kelompok utama. *Pertama*, pola 5 ha, yang terdiri dari LP (0.25 ha), LU I (0.75 ha), LU-II (2 ha), LU-cadangan (1 ha), dan Lahan

Karet (1 ha). *Kedua*, pola 3.50 ha, yang terdiri dari LP (0.25 ha), LU-I (1.00 ha), LU II (1.25 ha), dan Lahan Karet (1 ha). Penanaman karet dilakukan 2-3 tahun setelah penempatan transmigran, sehingga panen perdana karet untuk warga Batumarta VII sudah terjadi pada tahun 1986/87. Pada kawasan *IBRD I*, penanaman karet swadaya terjadi pada 1990-1994, setelah transmigran bisa menikmati hasil karet secara stabil. Awalnya mereka tanami LU-I (yang sudah siap tanam) dengan tanaman karet. Pada tiga tahun pertama masih dilakukan tumpang sari dengan tanaman pangan. Kemudian mereka buka juga LU-II dan LU-III; lahan ini dibuka terakhir karena relative memerlukan modal yang besar untuk membukanya karena masih bervegetasi hutan dan belukar.

Tanaman karet merupakan prioritas pengembangan usaha di kawasan Batumarta unit VII. Pelaksanaan penanaman karet dilaksanakan oleh PTP X yang telah dimulai pada tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1987. Untuk UPT VII telah melaksanakan penyadapan sejak tahun 1986-1987 dan untuk penyadapan ladang swadaya dimulai tahun 1994-1995. Pelaksanaan pengelolaan karet transmigran di Batumarta menerapkan 2 pola yaitu pola bebas atau non mini estate dan pola mini estate. Pola bebas adalah sistem pengelolaan karet yang dilaksanakan sendiri oleh transmigran pada kebun karetnya masing-masing, sedang pemasaran hasil dikoordinasikan oleh KUD setempat. Pola mini estate adalah sistem pengelolaan karet yang kegiatan-kegiatan penyadapan, pemeliharaan, pengelolaan hasil dan pemasaran melalui KUD setempat dengan supervisi oleh PTP X.

Penempatan transmigran di Batumarta VII (*IBRD I*) sudah dimulai sejak tahun 1979. Penempatan dilakukan sesuai dengan kemajuan pembangunan permukiman. Ketika ditempatkan, transmigran menerima jaminan hidup (jadup) selama dua tahun. Pada saat yang sama transmigran memperoleh bantuan sarana produksi pertanian agar bisa membudidayakan tanaman pangan di LP dan LU-I. Disamping usaha transmigran yang dominan dalam penanaman karet, juga diusahakan pertanian tanaman pangan. Budidaya tanaman padi menggunakan sistem tumpang sari dengan kondisi lahan tanah kering. Umumnya produksi pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi

¹³ Umar Hamzah, Model Pengembangan Perkebunan Karet Berkelanjutan Pada Kawasan Transmigrasi Batumarta, *Tesis*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2011) hlm.66

¹⁴ *Ibid*

kayu, kacang hijau, kedelai. Tanaman perkebunan lainnya biasanya ditanam sebagai tanaman sela baik di lahan pekarangan maupun di lahan usaha I, Pemerintah juga memberikan bantuan ternak kepada setiap keluarga transmigran yakni seekor sapi betina dengan syarat mengembalikan anak pertama dari sapi tersebut kepada pemerintah, setelah menyetorkan anakan sapi yang pertama otomatis sapi tersebut menjadi milik warga transmigran. Tujuan pemerintah dalam hal ini adalah selain para transmigran bertani mereka juga bisa melakukan pekerjaan sampingan sebagai peternak sapi, karena ketersediaan pakan sapi yakni rerumputan yang melimpah ruah pada lokasi transmigrasi di Batumarta pada waktu itu.

Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan transmigrasi Batumarta Unit VII cukup lengkap terdapat 2 sekolah dasar dan 2 puskesmas pembantu, untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar biasanya warga unit VII harus melakukan perjalanan ke daerah unit VI karena untuk SMP (sekolah menengah pertama), dan SMA (sekolah menengah atas) tidak ada di unit VII. Sarana peribadatan yang ada di Batumarta unit VII terdiri dari mesjid 8 mesjid buah, langgar 16 buah, dan pura 3 buah. Selain itu, di kawasan Batumarta unit VII juga tersedia berbagai sarana olahraga sehingga warga masyarakat bisa melaksanakan berbagai kegiatan antara lain sepak bola, *volley ball*, dan bulu tangkis. Perkembangan kelembagaan desa sudah cukup baik karena lembaga-lembaga di desa seperti LMD, LKMD, PKK, Karang Taruna maupun Kontak Tani pada umumnya telah berfungsi serta berperan dalam upaya membantu pembinaan terhadap masyarakat transmigran. Lembaga ekonomi KUD ada di tiap-tiap Unit Permukiman Transmigrasi dan sudah berbadan hukum serta telah berperan baik dalam upaya membantu kegiatan pemasaran karet dari warga transmigran untuk disalurkan ke PTP X, maupun sebagai penyalur pupuk dan pestisida. KUD-KUD tersebut saat ini sudah berstatus sebagai KUD mandiri. Sarana penunjang yang ada di kawasan Batumarta unit VII antara lain sarana transportasi yang sangat mendukung dalam kelancaran kegiatan perekonomian di kawasan ini. Panjang jalan yang telah dibangun pemerintah yaitu jalan penghubung sepanjang 15 km, jalan poros 20,5 km serta jalan desa sepanjang 56,5 km. Selain itu telah dibangun 3

buah jembatan yang dibangun melalui kegiatan proyek pemerintah, maupun swadaya masyarakat.¹⁵

C. Pengaruh Transmigrasi di Pemukiman Batumarta Unit VII Tahun 1979-1990

Menurut Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.115/MEN/1992 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Transmigrasi, penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya terkait erat dengan program investasi dalam rangka kegiatan produksi dan jasa tertentu. Dikembangkannya pola kegiatan usaha pokok transmigrasi dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah upaya pembangunan transmigrasi melalui model investasi atau pola pengembangan permukiman transmigrasi.¹⁶ Jenis kegiatan usaha pokok ditetapkan berdasarkan hasil optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Kegiatan usaha pokok yang berlaku bagi setiap permukiman transmigrasi adalah merupakan kegiatan usaha dominan. Kegiatan usaha pokok permukiman transmigrasi dibagi atas sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penerima transmigrasi terbesar di Sumatera. Secara ekonomi, lahan kering yang ada di provinsi Sumatera Selatan relatif potensial untuk dikembangkan pada berbagai komoditas pertanian lahan kering. Secara spesifik, wilayah di Sumatera Selatan yang memiliki lahan kering tersebut adalah Batumarta unit VII yang berada di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemberian lahan seluas 5 hektar per KK tidak langsung memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian warga transmigrasi di unit VII Batumarta. Pengelolaan lahan membutuhkan proses panjang sehingga hasilnya benar-benar bisa dinikmati oleh warga. Artinya, sejak pembukaan unit 7 tersebut, warga belum mendapatkan penghasilan dari lahan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan, untuk penanaman perdana pohon karet yang menjadi proyek

¹⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Data Pencari Kerja yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumatra Selatan : Disnakertrans, 2012. Hlm.20

¹⁶ Heeren, H.J, *Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1979), hlm. 18.

unggulan transmigrasi Batumarta baru bisa ditanam 2-3 tahun pasca penempatan.¹⁷ Di Batumarta unit VII, penanaman karet baru dilakukan pada tahun 1982-1983. Sehingga, panen perdana baru terjadi pada tahun 1987/1988. Kondisi tersebut membuat warga harus menunggu sekitar 5 tahun hasil penanaman karet yang mereka kerjakan. Artinya, pelaksanaan transmigrasi tidak langsung memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian warga diawal-awal penempatan mereka tahun 1979-1982. Warga harus mencari pengasilan lain sambil menunggu hasil dari penanaman karet tersebut.

Persoalan di atas membuat perekonomian warga tidak menentu, mengingat karet menjadi prioritas utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga. Kondisi ini ditambah dengan status transmigran yang belum mengenal jauh daerah yang mereka tempati. Dalam mengantisipasi hal tersebut, pihak pemerintah memberikan bantuan (langsung) dalam proyek transmigrasi di Batumarta berupa uang saku, beras dan peralatan pertanian.¹⁸ Selain batuan sembako dan peralatan tersebut, pemerintah juga memberikan se ekor sapi kepada setiap keluarga transmigran tujuannya agar selain warga transmigran bertani mereka juga bisa berternak sapi.¹⁹

Dalam rangka mengawal pengelolaan karet sebagai program utama ekonomi di kawasan Batumarta, pemerintah membentuk Tim Pola Terpadu dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kebun karet secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan SK Bupati KDH Tk.II OKU Nomor 525.21/120/V/1985 tanggal 12 Desember 1985 dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D II). Tidak hanya itu, unntuk mengawal penerapan teknologi budidaya karet, Balai Penelitian Perkebunan Sembawa menempatkan Unit Pelayanan Teknik (UPT) di Batumarta II dan Batumarta XII. UPT ini

¹⁷ Djaja,kusnadi, "Proyek Nasional Transmigrasi Batumarta; daerah subur untuk bina keluarga dan perataan teknologi", suara merdeka, 10 Desember 1982 hal.1, kol. 7-9.

¹⁸ Van de Velde, J.J., Surat-surat dari Sumatera (Terjemahan), (Jakarta: Grafity Press, 1989), hlm. 120

¹⁹ Lampiran, 14 hlm. 111.

menyediakan kebun *entres* karet serta melakukan pelatihan teknis budidaya karet (mulai dari okulasi sampai dengan penyadapan).²⁰

Pengelolaan kebun karet tidak dipungkiri telah memberikan dampak positif sebagai penghasilan bagi transmigran di kawasan Batumarta, khususnya pemukiman unit VII.²¹ Ketika sudah memasuki masa penyadapan, setiap kebun yang baik rata-rata menghasilkan lateks 300 kg/ha/bulan. Jika masa simpan selama 10-15 hari, maka lateks itu akan laku dijual rata-rata seharga Rp.9.000/kg. Apabila kadar air lebih rendah, misal telah ditiriskan selama sebulan, harga lateks bisa meningkat menjadi Rp.12.000/kg. Namun jarang petani yang menjual lateks dengan kadar air rendah. Petani lebih suka menjual pada tingkat harga Rp.9.000.

Berdasarkan gambaran harga jual rata-rata di atas, setiap hektar kebun karet per bulan memberikan penghasilan kotor sebesar Rp.2.700.000 per ha. Pengelolaan kebun karet menjadi satu indikator keberhasilan ekonomi bagi warga transmigran di pemukiman unit VII. Bahkan, keberhasilan ekonomi dipandang sebagai kesuksesan program transmigrasi secara keseluruhan.

Kedatangan transmigran ke wilayah unit VII Batumarta tidak hanya berdampak pada kondisi perekonomian semata. Perbedaan latar belakang suku, agama dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing transmigran berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial di Batumarta unit VII. Persoalan sosial budaya menjadi bagian penting dalam program transmigrasi yang tidak bisa dihindari dan akan membangun proses sosial di kalangan transmigran. Menurut Soerjono Soekanto, bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meyangkut hubungan orang dengan perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun perorangan dengan kelompok manusia.²² Situasi di unit VII Batumarta telah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tim Penulis, *Panduan Karet Lengkap*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hlm. 15.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 55.

menunjukkan sebuah interaksi sosial dimana berbagai orang atau kelompok transmigran dengan berbagai latar belakang bertemu dalam satu tempat. Mereka menyadari akan adanya pihak lain dari masing-masing orang yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan, seperti cara berkomunikasi.

Secara umum, interaksi sosial akan mengarah pada bentuk *asosiatif* (kerjasama) dan *disasosiatif* (pertentangan). Dalam hal ini, Gillin dan Gillin mengungkapkan bahwa dampak atau akibat dari adanya interaksi sosial adalah adanya proses *asosiatif* yang meliputi akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Sedangkan proses *disasosiatif* meliputi persaingan dan pertentangan.²³ Peran komunikasi sebagai jembatan perbedaan di kawasan Batumarta unit VII memiliki dampak yang signifikan. Latar belakang bahasa yang berbeda di kalangan transmigran tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap hidup berdampingan dalam satu wilayah. Terbukti sejak unit 7 Batumarta dibuka untuk wilayah pemukiman transmigran pada tahun 1979/80, kehidupan para transmigran terus berjalan. Berdasarkan bahasa yang digunakan, proses komunikasi di kalangan warga transmigran yang ada di Batumarta unit VII dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, bahasa daerah yang merupakan bahasa warga transmigran berasal. Penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi digunakan oleh transmigran unit VII Batumarta yang memiliki kesamaan bahasa daerah tersebut. Proses komunikasi ini digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam lingkup keluarga. *Kedua*, proses komunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dilakukan oleh transmigran di unit VII Batumarta ketika berkomunikasi dengan transmigran lain yang sama sekali tidak memahami bahasa asal daerahnya.

Fenomena pertemuan budaya yang berbeda di kawasan Batumarta unit VII bisa menyebabkan masing-masing pihak berubah kebiasaan budayanya. Dalam kajian sosiologi hal ini dinamakan dengan istilah asimilasi. Menurut Koentjaraningrat²⁴, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang

kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Bentuk asimilasi di unit VII Batumarta terjadi pada proses komunikasi sebagai awal terjadinya interaksi sosial. Transmigran yang berasal dari wilayah pulau Jawa seperti Japarin yang berasal dari Surabaya, perlahan dialek *Surboyanan* berkurang dan berganti dengan bahasa Indonesia berlogat Melayu. Bahkan, Made Kerti seorang transmigran asal Bali bisa mengenal dan menggunakan bahasa Jawa karena dia sering bergaul dengan transmigran asal Jawa. Proses asimilasi juga berlangsung dalam bentuk perkawinan. Di kawasan Batumarta unit VII pernikahan campuran antar suku yang berbeda sudah biasa terjadi, setidaknya menjelang awal tahun 1990-an. Pernikahan campuran merupakan indikasi bahwa penduduk yang ada di Batumarta cukup terbuka dengan suku lain. Mereka tidak melarang anak-anak mereka menikah dengan warga yang berasal dari suku lain. Hal tersebut menjadikan hubungan antar suku semakin erat, serta interaksi antara kedua belah pihak semakin lancar karena mereka saling menghargai. Perkawinan campuran ini merupakan salah satu cara mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Proses terciptanya pembauran di masyarakat transmigran Batumarta unit VII merupakan sebuah proses panjang. Kemajemukan yang ada dari sisi suku, bahasa, budaya atau agama, akan melahirkan sebuah lingkungan yang rawan konflik. Perbedaan-perbedaan yang ada diantara masyarakat akan mudah menjadi petaka jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, menurut Burhan Selaku lurah desa Nikan dan pemangku adat suku komering (suku pribumi) kawasan Batumarta, dia menetapkan dua seruan kepada masyarakat terkait dengan masalah sosial budaya. Seruan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jangan ada kecemburuan yang mengakibatkan kesenjangan.

²³ *Ibid*, hlm. 65.

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 255.

- b. Tidak ada istilah dan perbedaan antara transmigran atau non transmigran. Semua sama.²⁵

Seruan di atas tidak terlepas dari pandangan Burhan sendiri yang menganggap masalah adat atau budaya adalah hukum. Menurut dia, istilah “transmigran” mengakibatkan adanya benang pemisah yang akhirnya ada yang mengakui punya hak dan yang lemah atau kurang punya hak. Sedangkan seluruh warga yang masih ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki hak yang sama. Burhan lebih memilih dengan menggunakan istilah “hijrah”. Hal ini ia utarakan langsung kepada Edy Yusuf selaku bupati OKU Timur yang sedang mengikuti acara hari ulang tahun transmigrasi Batumarta tahun 1992. Dalam mengantisipasi perbedaan adat dan budaya yang dibawa oleh masing-masing transmigran, penduduk di kawasan Batumarta unit VII menyepakati adanya semi adat. Maksud dari semi adat adalah persoalan adat diserahkan kepada masing-masing penduduk. Artinya, penduduk di Batumarta unit VII dipersilahkan untuk memakai adat yang mereka percayai dalam berbagai sendi kehidupan. Penduduk Batumarta unit VII tidak dipaksa untuk memakai adat tertentu. Mereka dibebaskan dan menyesuaikan dengan adat yang mereka yakini.

Sejak ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi tahun 1979, wilayah Batumarta unit VII tidak pernah terjadi bentrok fisik yang berakibat pada gejolak sosial masyarakat. Proses disasosiatif yang pernah terjadi adalah penggunaan adat *wonogirinan* dalam salah satu prosesi pernikahan salah satu warga pada tahun 1985. Hal ini sebagaimana diakui oleh Burhan selaku Kades Unit. Menurutnya, dalam acara pernikahan tersebut, terjadi salah kaprah dimana ada adat yang dipaksakan kepada yang memiliki hajat untuk menggunakan adat nikah yang berbeda dengan adatnya. Kejadian tersebut menjadi malapetaka karena mengganggu kelancaran prosesi pernikahan. Oleh karena itu, pasca kejadian ini Burhan mengajukan adanya istilah semi adat yang kemudian disepakati oleh warga Batumarta unit VII.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Burhan di Batumarta Unit VII Pusat Desa, pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2017 pukul 19.00 WIB

Selain kejadian di atas, proses disasosiatif yang terjadi di kawasan Batumarta unit VII masih termasuk katagori wajar dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perbedaan pendapat diantara warga. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Bahkan Japarin yang menempati unit VII Batumarta mengakui tidak ada konflik secara budaya yang berarti selama ia tinggal di kawasan transmigrasi tersebut. Bagi Japarin, persoalan budaya atau adat bukan menjadi masalah. Ia dan istrinya tetap memegang budaya *Suroboyanan*, namun untuk beberapa hal dia menyesuaikan dengan kondisi. “*Jadi adat sing lewih enteng opo penak iku sing dijejali*”. (jadi adat yang lebih gampang dan enak itu yang dilakukan).²⁶

Pengakuan Japarin di atas menegaskan bahwa warga di pemukiman unit VII Batumarta secara pribadi berhak mengatur hidup mereka secara budaya selama tidak mengganggu orang lain. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang dirumuskan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial berdiri di atas sejumlah asumsi dasar. Pertama, karakteristik dari manusia adalah keplastisannya, yaitu fleksibilitas untuk mempelajari beragam perilaku diberagam situasi. Kedua, melalui model penyebab *reiprok triadik*, yang terdiri atas perilaku, lingkungan dan faktor-faktor kepribadian, manusia memiliki kapasitas untuk mengatur hidup mereka. Ketiga, teori ini menggunakan aspek keagenan, artinya manusia memiliki kapasitas untuk melatih pengontrolan atas alam dan kualitas hidup mereka sendiri. Keempat, manusia mengatur hubungan mereka melalui faktor-faktor internal dan eksternal.²⁷ Atas dasar adanya kesesuaian dan pembauran pergaulan secara membaur diantara warga, kehidupan sosial budaya di pemukiman unit VII Batumarta terjalin secara harmonis. Begitu pula dengan naiknya taraf kesejahteraan keluarga transmigran yang meningkat seiring keseriusan mereka di tanah perantauan. Selain itu terdapat juga nilai lebih terkait dengan silang budaya yang terjadi, hal ini sangat

²⁶ Wawancara dengan Bapak Djaparin di Batumarta Unit VII Blok D, pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2017 pukul 19.00 WIB

²⁷ Jessdan Friest dan Gregory J. Feist, *Theory of Personality*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 407.

memperkokoh semangat kebhinnekaan di antara sesama suku bangsa di Indonesia.

D. Kesimpulan

Pemukiman unit VII di Batumarta merupakan salah satu pemukiman Transmigrasi yang terletak di Kecamatan Madang Suku III desa Wana Bakti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan. Kawasan transmigrasi ini secara resmi dibuka oleh pemerintah pada tahun 1979-1990 melalui bantuan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) 1. Datangnya transmigran yang menempati pemukiman unit VII di Batumarta di latar belakang oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, bencana alam, swadaya dan program *bedol desa* di Wonogiri yang menjadi penduduk mayoritas unit VII. Secara ekonomi, pengaruh transmigrasi terhadap kesejahteraan warga di pemukiman Batumarta unit VII dapat dirasakan setelah pohon karet yang ditanamkan oleh pemerintah siap untuk dipanen. Warga transmigran bisa mandiri secara ekonomi, bahkan mereka mampu membuktikan peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan penanaman pohon karet di Batumarta unit VII dilaksanakan pada tahun 1982 oleh pemerintah dan pada 1990 oleh swadaya masyarakat, dan harus menunggu selama kurang lebih 5 tahun agar bisa dilakukan penyadapan pada tanaman karet. Selama menunggu waktu penyadapan, aktivitas ekonomi warga sebagian besar bertumpu pada lahan pertanian pangan atau buruh pada pemerintah seperti membangun jalan dan jembatan.

Pengelolaan pohon karet menjadi program utama bagi kehidupan warga di Batumarta, Dalam mengawal program tersebut, pemerintah membentuk Tim Pola Terpadu dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kebun karet secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan SK Bupati KDH Tk.II OKU Nomor 525.21/120/V/1985 tanggal 12 Desember 1985 dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II (TP3D II).

Menurut sudut pandang sosial budaya, perbedaan latar belakang penduduk memberikan pengaruh terhadap di pemukiman transmigrasi unit VII Batumarta. Hal ini bisa dilihat berdasarkan dua proses, yakni proses *asosiatif* dan proses *disasosiatif*. Dalam proses *asosiatif* warga di unit VII Batumarta melakukan proses kerjasama dalam berbagai

bentuk, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan yang diadakan setiap satu bulan sekali. Selain proses kerjasama, transmigrasi di unit VII melahirkan proses asimilasi seperti perkawinan antar warga yang berbeda suku. Kondisi tersebut membuat kerukunan antar warga makin terjalin dengan erat tanpa harus membeda-bedakan latar belakang.

Proses *disasosiatif*, kehidupan social budaya di pemukiman unit VII Batumarta pernah dilanda konflik pada tahun 1985 ketika terjadi pemaksaan oleh salah satu pihak agar acara perkawinan dilakukan dengan adat tertentu. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi konflik berkelanjutan. Warga di pemukiman unit VII menyetujui adanya semi adat, dimana persoalan adat diserahkan kepada individu masing-masing agar terhindar dari sikap memaksakan kehendak yang mengganggu kerukunan. Disamping itu, istilah semi adat bertujuan agar warga saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Secara ekonomi Batumarta unit VII termasuk kedalam program transmigrasi yang sukses dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan para transmigran yang rata-rata penghasilan mereka 5 juta per kk dalam satu bulan. Selain itu rumah rumah para transmigran pun kini sudah banyak yang menggunakan tembok bata jika dibandingkan dulu semasih mereka di Jawa dan Bali rumah mereka masih menggunakan papan kayu. Kini para mantan transmigran Batumarta unit VII bisa meyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi berkat kerja keras dan kegigihan mereka dulu semasa awal-awal transmigrasi. Semua para transmigran yang saya wawancarai mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengadakan program transmigrasi di Batumarta unit VII, karena mereka merasa terbantu dengan adanya program tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arsip**
 BPAD, Direktorat Transmigrasi, No. 24.
 BPAD, Persyaratan Peserta Latihan Usaha Tani Calon Transmigrasi.
 BPAD, Target Realisasi Hasil Latihan.
 BPAD, Risalah Rapat Pleno Bapelda Transmigrasi Kabupaten Wonogiri.
 BPAD, Direktorat Transmigrasi, No. B. 374.
 BPAD, Direktorat Transmigrasi, No. 214.

BPAD. Departemen Transmigrasi, No. B. 240.
BPS, Laporan Mengenai Nama Transmigran, Trip. XI.
BPS, Laporan Mengenai Nama Transmigran, Trip. XVII

Buku dan Artikel

Amral Sjamsu, *Dari Kolonialisasi ke Transmigrasi*, Jakarta: Djambatan, 1960.

Arif Budiman, "*Transmigrasi di Indonesia*", Jakarta: Gramedia, 1985

Djaenuddin, *Statistik Sumberdaya Lahan Tanah Indonesia*, Pusat Penelitian Bogor, 1987.

Heeren H. J. *Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Hamalik, Oemar, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hardjono, Joan, *Transmigrasi – Dari Kolonialisasi sampai Swakarsa*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982

Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Helius Sayamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

John A. Dixon, "*Biaya-biaya Pemukiman Atas Areal Tanah dan Alternatif-alternatifnya*", Prisma, Tahun VIII No. 4 1980.

Jones G. W. "*Indonesia: Program Transmigrasi dan Rencana Pembangunan*", Jakarta: UI Press, 1986.

Jessdan Friest dan Gregory J. Feist, *Theory of Personality*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Kampto Utomo, "*Marga Lampung dan Kedudukan Kaum Pendatang*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koentjoroningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 1980

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

_____, *Penjelasan Sejarah: Historical Explanation*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Anwas O. M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Marwan Jafar, *Transmigrasi Menggapai Cita*, Jakarta: PT. Tempo Inti Media, 2016.

Nicoll, G. Mc. *Internal Migration in Indonesia: Description Note Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tiga, 2005.

Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* Jakarta: Mega Book Store, 1984.

Nugraha Setiawan, *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM, 1994.

Patrice Levang, *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: KPG, 2005.

Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Ramdhan KH, dkk., *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Departemen Transmigrasi RI, 1993.

Rozy Munir, "*Transmigrasi*" dalam Dasar-dasar Demografi, Jakarta: Lembaga Demografi UI.

Moh Ali R. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Rukman Sardjadidjaja, *Transmigrasi Pembauran dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sjamsu, M. Amal, *Dari Kolonialisasi sampai Swakarsa*, Jakarta: PT. Gramedia, 1960.

Slamet Purboadiwidjojo, dalam buku *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-198*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Soekartawi, *Teori Ekonomi dan Produksi*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990

Sri Ana Handayani, *Transmigrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Jember: Universitas Jember, 1994.

Sri Edi Swasono, "Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi", dalam Sri Edi Swasono dan Masri Sinagrimbun, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1986*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Suparno, Erman, *Paradigma Baru Transmigrasi*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2007.

Suratman dan Patrick Guinness, "The Changing Focus of Transmigration" dalam Said Rusli, *Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjut*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Syamsu, *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi*, Djakarta: Djembatan, 1986.

Tim Penulis, *Panduan Karet Lengkap*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.

Tjondronegoro, "Migrasi Berencana, Tolak Ukur Keberhasilan dan Misi

Departemen di Masa Depan", Jakarta: UI Press, 1986.

_____, SMP, *Mencari Pola Transmigrasi Baru: Penjajagan Konsep*, Bogor: LSP Institut Pertanian Bogor, 1977.

Totok, M. dan Soebiato, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Skripsi dan Tesis

Sugiono Benny Sihombing, "Kolonialisasi Di Sumatera Timur (Studi Tentang Kehidupan Kolonis Jawa di Sumatera Timur) Tahun 1905-1942", *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sejarah UNY, 2013.

Chandra Dedy Saputra, "Migrasi (Bedol Desa) Masyarakat Wonogiri: Dampak Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Tahun 1976-1990", *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sejarah UNY, 2015.

Umar Hamzah, "Model Pengembangan Perkebunan Karet Berkelanjutan Pada Kawasan Transmigrasi Batumarta", *Tesis*, Bogor: Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan ITB, 2011.

Internet

<http://beritabatumarta.blogspot.co.id/2016/03/s-eputar-batumarta>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 15.00 WIB.